

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah Golongan Putih atau Golput merupakan sebutan kepada individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada. Fenomena ini kerap dipandang sebagai ancaman terhadap konsolidasi demokrasi, karena tindakan tidak memilih dianggap sebagai bentuk ketidakikutsertaan dalam proses demokratis yang idealnya melibatkan partisipasi aktif seluruh warga negara. Tingginya jumlah Golongan Putih hingga melebihi perolehan suara kandidat pemenang pemilu menunjukkan bahwa hasil pemilu belum sepenuhnya merepresentasikan kehendak mayoritas masyarakat. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan penerimaan dari masyarakat terhadap hasil pemilu dan mengindikasikan bahwa pemerintahan yang terbentuk belum tentu memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.

Partisipasi politik adalah salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin.

Secara teoritis pemahaman terhadap perilaku golput tidak jauh berbeda dengan penjelasan teori perilaku politik. Perilaku politik dapat dimaknai sebagai kecenderungan individu dalam merespons lingkungan politik, yang dalam perkembangannya dapat membentuk perilaku kolektif di dalam suatu sistem politik guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam konteks perebutan kekuasaan atau

kemenangan politik. Dalam kajian mengenai budaya politik, Setiadi dan Kolip (2013:95) menjelaskan bahwa sikap politik pada dasarnya bersifat dinamis dan tidak selalu bersifat konstan. Pembentukan sikap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik pada level individu maupun sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi pengalaman pribadi, latar belakang kebudayaan, pengaruh dari individu atau kelompok yang dianggap signifikan, peran media massa, orientasi partai politik, serta aspek emosional yang melekat pada individu. Pemikiran yang membentuk perilaku politik individu dan perilaku kolektif masyarakat atau bangsa terhadap suatu sistem politik yang telah bertahan lama akhirnya membentuk semacam pola-pola politik masyarakat, hingga menghasilkan keputusan politik atas dasar sikap-sikap tersebut. Hal inilah yang kemudian membentuk yang namanya budaya politik.

Fenomena Golput sepertinya dapat menguatkan pernyataan yang dikemukakan oleh Anthony Giddens (dalam Mardatillah 2000:138) *“haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik dimana demokrasi sedang marak”*. Dalam konteks ini, tingginya angka golput dalam penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi indikasi yang mengkhawatirkan bagi kualitas demokrasi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis partisipasi politik, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi institusi negara, terutama menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai instrumen utama dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mendorong keterlibatan warga negara dalam proses politik. Tingginya tingkat Golongan Putih (Golput) dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh

masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap hasil pemilihan itu sendiri. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi derajat legitimasi pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, legitimasi kepemimpinan akan semakin kuat apabila proses pemilihan didukung oleh tingkat partisipasi yang tinggi. Pemimpin yang terpilih dengan dukungan luas dari masyarakat tidak hanya memperoleh keabsahan secara hukum, tetapi juga akan memiliki kepercayaan diri dan dukungan sosial yang lebih besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 membawa tantangan serius terhadap tingkat partisipasi masyarakat serta kualitas demokrasi itu sendiri. Proses suksesi kepemimpinan daerah pada masa krisis kesehatan global berisiko terganggu oleh kekhawatiran terhadap penyebaran virus. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di tingkat nasional sebesar 76,09 persen. Tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan cerminan dari semakin mengakar dan menguatnya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun tingkat partisipasi secara nasional meningkat dari tahun sebelumnya, di beberapa daerah masih terdapat tingginya sikap apatis masyarakat yang ditunjukkan dengan tidak menggunakan hak pilih di TPS.

Pilkada Tahun 2020 mencatat tingginya angka golongan putih (golput) di berbagai daerah, sehingga memunculkan anggapan bahwa "panggung demokrasi" justru didominasi oleh ketidakikutsertaan pemilih. Data dari total sekitar 100,3 juta pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), data di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih untuk

tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan, angka tersebut melebihi suara calon kepala daerah yang mendapat angka tertinggi. Beberapa daerah yang mengalami Golput tinggi, yaitu Medan, Depok, Kediri, Tangerang Selatan dan Denpasar (merdeka.com, 2020).

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, memiliki luas wilayah sebesar 12.778 hektare atau setara dengan 2,27 persen dari total luas wilayah Provinsi Bali. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju. Kota Denpasar berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, industri, dan pariwisata di Provinsi Bali. Secara administratif, wilayah ini terbagi ke dalam empat kecamatan, yakni Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebanyak 962.900 jiwa yang terdiri dari 491.500 penduduk laki-laki dan 471.400 penduduk perempuan.

Ketersediaan sarana peribadatan seperti pura, masjid, gereja, vihara, dan tempat ibadah lainnya merupakan komponen vital dalam mendukung pembangunan aspek keagamaan dan spiritual masyarakat. Populasi umat beragama di Kota Denpasar terdiri atas 557.308 pemeluk agama Hindu, 252.926 pemeluk Islam, 38.917 umat Protestan, 18.085 umat Katolik, serta 12.974 pemeluk agama Buddha. Untuk menunjang kebutuhan spiritual umat Hindu, tersedia 115 (seratus lima belas) Pura Kahyangan Tiga dan 1 (satu) Pura Sad Kahyangan/Dang

Kahyangan. Kemudian, 140 (seratus empat puluh) Masjid/Mushola, 5 (lima) Gereja Katolik, 86 (delapan puluh enam) Gereja Protestan serta 11 (sebelas) bangunan Vihara (Denpasar dalam angka, 2016 dalam Juliartha, 2017:423). Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kota Denpasar, Ida Bagus Rahoela menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Denpasar merupakan masyarakat yang berasal dari luar Denpasar, baik luar Bali maupun berbagai kabupaten di Bali, yaitu sekitar 75 persen warga Denpasar adalah kaum urban.

Kota Denpasar merupakan kota multikultural yang ditandai oleh keberagaman budaya dan etnis yang hidup berdampingan secara harmonis. Kekayaan warisan budaya di kota ini mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti seni, sastra, dan tradisi keagamaan, serta pusaka budaya multikultural yang tersebar di wilayah-wilayah seperti Desa Bali, Kota Tua Gajah Mada, Kampung Jawa, Kampung Cina, Kampung Arab, hingga Kampung Bugis. Keanekaragaman ini tumbuh dalam semangat toleransi dan koeksistensi yang kuat di tengah masyarakat Denpasar. Studi yang dilakukan oleh I Nyoman Harry Jualiartana dengan judul Konsep Kota Multikultural di Kota Denpasar mengungkapkan bahwa Denpasar memenuhi salah satu elemen penting dalam konsep kota multikultural. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan pola permukiman untuk mengidentifikasi keberagaman yang ada, dan hasilnya menunjukkan bahwa struktur permukiman di Kota Denpasar mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Denpasar memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai kota multikultural. Pola permukiman ragam budaya digambarkan pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Pola Pemukiman Multikultural Kota Denpasar



Sumber: Artikel Konsep Kota Multikultural di Kota Denpasar

Terdapat perbedaan tingkat partisipasi politik yang cukup signifikan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi KPU Kota Denpasar (kpu-denpasarkota.go.id), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 17 April 2019 tercatat mencapai 77,3 persen. Jumlah data pemilih Pemilu 2019 sebanyak 493.551 dengan rincian pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 464.132, DPTb sebanyak 9.316, dan DPK sebanyak 20.103. Dari jumlah tersebut, total pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 381.540 orang. Tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu ini juga meningkat jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih saat Pemilihan Gubernur Bali, yaitu sebesar 68 persen. Namun hal berbeda terjadi pada pemilihan

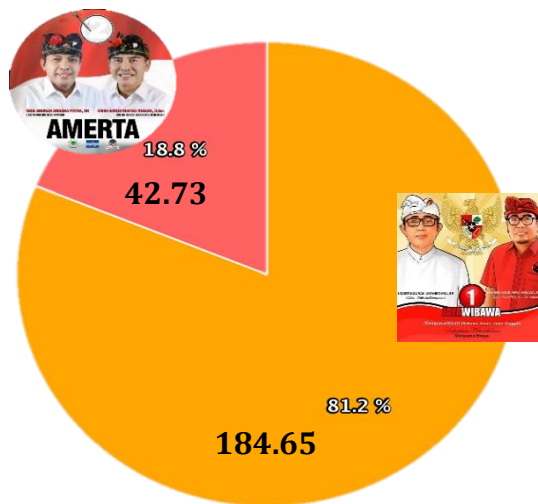
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020 terjadi penurunan partisipasi pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih sebagai bagian dari tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada, yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang tahapan pemilihan. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2020, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 444.929 pemilih, yang terdiri dari 219.534 pemilih laki-laki dan 225.395 pemilih perempuan. Para pemilih ini tersebar di empat kecamatan, yaitu Denpasar Selatan sebanyak 120.453 pemilih, Denpasar Timur 80.959 pemilih, Denpasar Barat 129.015 pemilih, dan Denpasar Utara 114.502 pemilih, yang keseluruhannya dilayani melalui 1.202 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3.1-KWK.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPU Kota Denpasar, tercatat sebanyak 239.325 pemilih atau sekitar 54 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020. Sementara itu, sebanyak 205.604 pemilih atau sekitar 46 persen dari jumlah DPT tercatat tidak menggunakan hak suaranya, yang mengindikasikan tingginya angka golongan putih (golput) dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Angka Golongan Putih (Golput) ini sudah tentu lebih tinggi dari perolehan suara pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Arya

Wibawa (Jaya-Wibawa) maupun pasangan calon Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kerta Negara (Amerta).

Gambar 1.2
Diagram Perolehan Suara Pilwalkot Denpasar Tahun 2020



Keterangan:

- Pasangan nomor urut 1 I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Arya Wibawa (Jaya-Wibawa)
- Pasangan nomor urut 2 Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kerta Negara (Amerta)

Sumber: kota-denpasar.kpu.go.id

Pasangan calon Jaya-Wibawa memenangkan Pilwalkot Denpasar tahun 2020 dengan jumlah perolehan suara, yaitu 81,2%. Persentase perolehan suara ini memang tinggi, namun masih dibawah angka golput, sebab persentase hanya setara dengan 184.655 suara, dengan begitu pasangan terpilih Jaya-Wibawa kalah dari

golput dengan selisih 20.949 suara. Sedangkan jumlah perolehan suara pasangan Amerta yaitu sebanyak 42.730 suara atau sekitar 18,8%.

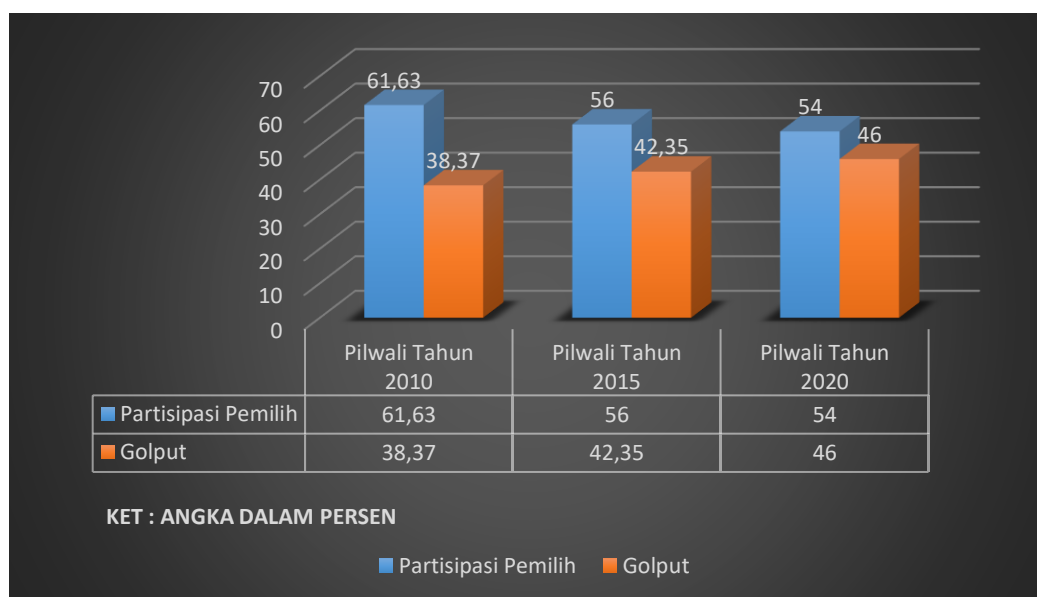
Jika ditinjau berdasarkan tingkat partisipasi politik per kecamatan pada Pilwalkot Denpasar 2020, Kecamatan Denpasar Timur mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi sebesar 59,41%, diikuti oleh Denpasar Utara sebesar 55,25%, Denpasar Selatan sebesar 51,40%, dan Denpasar Barat dengan tingkat partisipasi terendah sebesar 50,50%. Meskipun secara umum Denpasar Timur menempati posisi tertinggi di tingkat kecamatan, desa dengan tingkat partisipasi politik tertinggi justru berada di Kecamatan Denpasar Selatan, yakni Desa Serangan dengan angka partisipasi mencapai 83,37%. Sebaliknya, partisipasi terendah di kecamatan yang sama tercatat di Kelurahan Renon, yaitu sebesar 39,38%. Sementara itu, di Kecamatan Denpasar Barat, Desa Tegal Harum menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi sebesar 63,49%, yang diduga kuat dipengaruhi oleh peran aktif perbeker dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Tingginya angka Golongan Putih (Golput) pada pelaksanaan Pilwalkot Denpasar tahun 2020 menggerus tingkat partisipasi masyarakat, bahkan partisipasi Pilwalkot Denpasar tahun 2020 ini turun dari gelaran Pilwalkot Denpasar 5 tahun lalu, yaitu tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat 56%. Kondisi tersebut mencerminkan munculnya gejala apatisme di kalangan pemilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbukaan politik tidak serta-merta diikuti oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses rangkaian tahapan pada pemilihan umum.

Tingginya tingkat golongan putih yang terjadi pada Pemilihan Walikota Denpasar terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pilwalkot Denpasar Tahun 2010

jumlah angka golput tercatat sebanyak 38,37 persen, kemudian pada Pilwalkot tahun 2015 angka golput meningkat menjadi 42,35 persen dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 46 persen. Peningkatan angka golput menyebabkan penurunan pada jumlah partisipasi pemilih, yaitu pada tahun 2010 partisipasi pemilih sebesar 61,63 persen, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 56 persen dan pada Pilwalkot tahun 2020 menurun kembali menjadi 54 persen. Tren peningkatan angka Golput pada Pilwalkot Kota Denpasar dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1.3
Tren Peningkatan Angka Golput Pada Pilwalkot Denpasar Tahun 2010-2020



Sumber : diolah oleh penulis

Fenomena golongan putih (golput) dapat berdampak negatif terhadap konsolidasi demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal khususnya apabila rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan hak pilih terus berlanjut. Ketidakterlibatan dalam pemilihan umum atau pilkada

membuka celah bagi kemungkinan penyalahgunaan proses tahapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga berisiko mendelegitimasi hasil pemilu. Selain itu, individu yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sesungguhnya dianggap kehilangan legitimasi untuk mengajukan protes atau turut berpartisipasi aktif dalam proses politik selama masa pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tersebut.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020, KPU Kota Denpasar mengembangkan berbagai strategi sosialisasi yang adaptif dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian Ni Luh Manik Cahyaning Dewi dan tim yang berjudul "Komunikasi KPU Kota Denpasar Dalam Sosialisasi Pilwalkot 2020 di Tengah Pandemi Covid-19", disebutkan bahwa KPU membagi segmentasi sosialisasi menjadi 11 (sebelas) kelompok sasaran, yakni: pemilih berbasis komunitas, kaum marjinal, pemilih muda, pemilih pemula, keluarga, kelompok keagamaan, penyandang disabilitas, perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, relawan demokrasi, serta pemilih netizen.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Denpasar memanfaatkan beragam media komunikasi, baik digital maupun konvensional. Media sosial yang digunakan meliputi website resmi, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Sementara itu, media above the line mencakup radio, televisi, dan surat kabar yang diisi dengan konten jingle, iklan layanan masyarakat (smash), serta program interaktif. Untuk media below the line, KPU menggunakan berbagai media promosi

seperti banner, spanduk, baliho, woro-woro atau videotron, serta media berbasis barang seperti masker, tas belanja, dan tumblr.

Sebagai inovasi tambahan, KPU Kota Denpasar juga menyelenggarakan lomba alat peraga kampanye yang melibatkan Sekaa Teruna Teruni (organisasi kepemudaan) se-Kota Denpasar. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung penyebaran informasi pemilu, tetapi juga untuk membangun antusiasme serta mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbagai cara sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Denpasar tampaknya belum dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilwalkot Denpasar sehingga angka golput masih tinggi. Dampak negatif dari adanya Golongan Putih (Golput) ini, apabila tidak ditelusuri penyebabnya dan tidak diimbangi dengan kinerja Pemerintah yang berbasis good public governance, maka berpotensi menjadi ancaman keberlangsungan proses demokratisasi dan berimplikasi negatif melumpuhkan sendi-sendi demokrasi. Serta banyaknya penduduk urbanisasi di Kota Denpasar menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai budaya politik dari masyarakat urbanisasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam dengan judul penelitian “Golongan Putih (Golput) dan Budaya Politik Masyarakat Urban Kota Denpasar, Studi Kasus Pemilihan Wali Kota Denpasar Tahun 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020?
- b. Bagaimanakah budaya politik masyarakat urban di Kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020, serta menganalisis budaya politik masyarakat urban di Kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena tersebut.

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.
- b. Untuk menganalisis budaya politik masyarakat urban di Kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dari sumbangan ilmu pengetahuan untuk pengembangan teori selanjutnya, terutama untuk perbaikan kualitas Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilu melalui peningkatan partisipasi pemilih dan meminimalisir angka Golongan Putih (Golput).
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan fenomena Golongan Putih (Golput) agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Disamping manfaat teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak, maka dari itu manfaat penelitian ini secara praktis yaitu:

- 1) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar
 Penelitian berikut diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran dan masukan kepada KPU Kota Denpasar dalam

menentukan langkah-langkah strategis dan signifikan dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan tingginya angka golongan putih (golput) dan memahami budaya politik masyarakat urban di Kota Denpasar sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Denpasar.

2) Bagi Masyarakat Kota Denpasar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pengetahuan akan pentingnya untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih pada Pemilu maupun Pilkada.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang untuk melatih cara berpikir ilmiah peneliti dalam mencari pengetahuan tentang faktor penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) dan budaya politik masyarakat urban di Kota Denpasar.

1.5. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan penting yang dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti dalam merumuskan arah dan fokus penelitian. Tujuan utama dari penelitian sebelumnya ialah untuk mengetahui konstruksi keilmuan yang telah dibangun oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar orisinal serta belum banyak diteliti oleh pihak lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 8 (delapan) hasil penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Artikel Penelitian yang ditulis oleh Suwardi dan Budiyo (2020:203) dalam artikelnya yang berjudul "Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Election" menjelaskan bahwa fenomena golput merupakan kecenderungan yang muncul pada setiap penyelenggaraan pemilu dan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama yang bersifat politis dan ideologis. Golput tidak hanya dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Astuti (2020:53) dalam artikelnya yang berjudul "Analisis Bentuk Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu" berfokus pada perilaku golput di tingkat lokal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kelurahan Betungan cenderung mengabaikan pemilu karena lebih mementingkan urusan pribadi. Sikap ini didasari oleh kekecewaan yang mendalam terhadap perilaku para wakil rakyat, baik di masa lalu maupun saat ini. Warga tidak lagi menaruh harapan kepada pemimpin politik, sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk apatisme terhadap sistem politik yang ada.

Anam dan Somantri (2020:27) dalam tulisannya tentang Abstentions in 2014 and 2019 Indonesian Elections: Case Study of pro-democracy activist membahas bagaimana dinamika fenomena golput di kalangan aktivis pro demokrasi pada pemilu 2014-2019 di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa golput adalah aksi kolektif yang kontroversial. Gerakan golput lahir dari jaringan aktivis pro-demokrasi yang bergerak dibidang advokasi. Golput dilakukan sebagai protes terhadap penguasa dan boikot pemilu. Kemudian, Firdaus (2013:165) meneliti

tentang Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia menyatakan bahwa fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Dalam tulisan ini diakui bahwa belum bisa mengidentifikasi secara jelas, apakah golput dilakukan secara sadar maupun tidak. Dalam konteks perilaku memilih di Indonesia dikatakan bahwa angka golput dapat bersumber dari kesalahan teknis administratif dan kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah.

Amrizal dan Dalimunthe (2018:2) yang meneliti tentang Model Countermeasures of Golput (Election Abstainers) Based on Change of Voters Behavior Simultaneous Regional Elections in Sumatera Utara menjelaskan bahwa golput dinilai sebagai pemenang karena memiliki persentase pemilih terbesar dibandingkan dengan pemilih calon peserta pemilu. Golput terjadi karena model penanggulangan golput yang hanya dilakukan oleh KPUD melalui sosialisasi sederhana belum efektif mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu yang digelar. Kemudian dalam penelitian Prajoko (2017:14) tentang General Election Commission and Non-Voting Behavior (GOLPUT): An Analysis from Political Communication Perspective, menunjukkan bahwa ada 4 alasan masyarakat Sragen memilih untuk Golput, karena kurangnya minat partisipasi politik masyarakat, kurang tanggapnya sosialisasi politik oleh KPUD Kabupaten Sragen, faktor figur atau calon yang akan dipilih, dan faktor kekecewaan atau rendahnya tingkat kepuasan warga terhadap kinerja dan perilaku politik calon.

Selain itu, alasan masyarakat golput juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2014:1) yang berjudul *Abstention, Democracy and Decentralization: A Case of Direct Election in North Sumatera Province 2013*, Indonesia, menyatakan beberapa alasan mengapa golput ada dalam pemilihan langsung di Indonesia, khususnya pada pemilihan langsung Sumatera Utara. Hal ini disebabkan demokrasi diartikan sebagai pemilu saja, ketidakpercayaan pemerintah dan konsep kewarganegaraan yang bermasalah. Penolakan tersebut berdampak negatif terhadap keberlangsungan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan tingginya angka golput akan mengancam demokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Golput, enam peneliti terdahulu menyatakan hal yang hampir sama, golput didasari karena faktor psikologis dan pilihan rasional, yaitu adanya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, calon yang berkontestasi, dan adanya pemilu dianggap tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka, sehingga membuat pemilih enggan menggunakan hak pilihnya. Kemudian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput) yaitu, pemilih lebih memilih berkumpul bersama keluarga atau tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa, seperti yang terlihat pada penelitian yang ditulis oleh Suwardi & Budiyanto (2020:218) dan Linda Astuti (2020:53).

Kemudian dari penelitian terdahulu yang ditulis Anam dan Somantri (2020:27), menyatakan bahwa golput merupakan aksi kolektif yang kontroversial.

Gerakan golput lahir dari jaringan aktivis pro-demokrasi yang bergerak dibidang advokasi. Golput dilakukan sebagai protes terhadap penguasa dan boikot pemilu. Sementara itu, dalam penelitian yang ditulis oleh Suwardi dan Budiyanto (2020:218) disebutkan bahwa tindakan golput seharusnya dipandang sebagai bentuk pilihan politik individu yang patut dihormati. Mereka menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pilihannya, termasuk untuk tidak memilih, dan pilihan tersebut tetap harus dihormati meskipun bertentangan dengan pandangan mayoritas atau pihak lain.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah ingin mengidentifikasi dan memahami faktor penyebab tingginya angka golput, namun penelitian terdahulu hanya meneliti sebatas melihat bentuk-bentuk golput sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih luas, yaitu selain untuk mengetahui faktor penyebab golput, peneliti juga akan meneliti terkait dengan ekspresi politik masyarakat Kota Denpasar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut tidak selalu ditentukan oleh letak geografis maupun kondisi demografis suatu wilayah, sebagaimana yang kerap menjadi fokus utama dalam banyak kajian sosiologis. Kajian yang dilakukan oleh Robert D. Putnam (1993:35–42) menunjukkan bahwa dalam satu negara yang sama dapat berkembang budaya politik yang berbeda-beda, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja sistem politik di wilayah tersebut. Dalam penelitiannya terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi di berbagai wilayah Italia, Putnam menemukan bahwa kebijakan yang secara formal seragam tersebut menghasilkan ekspresi politik yang tidak homogen.

Secara umum, wilayah Italia bagian utara menunjukkan budaya politik yang mendukung dan kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik yang aktif, kepercayaan sosial yang tinggi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sebaliknya, di wilayah selatan berkembang budaya politik yang kurang mendukung demokrasi, ditandai dengan tingginya tingkat korupsi, rendahnya partisipasi warga, serta maraknya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa budaya politik memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding faktor struktural seperti letak geografis atau demografi semata.

Keberagaman yang terdapat di Kota Denpasar, yang didominasi oleh masyarakat urban sehingga dijadikan sebagai kota multikultural tentu berdampak pada perilaku politik warga dengan beragam ekspresinya. Firmansyah (2018:121), dalam penelitiannya yang berjudul *Kemajemukan Dalam Politik Etnis Masyarakat Urban (Studi Pada Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Kota Metro)*, menjelaskan bahwa karakteristik sosio-politik masyarakat pendatang di Kota Metro masih menunjukkan kecenderungan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan ikatan emosional, yang umumnya didasari oleh kesamaan etnis atau agama.

Meskipun demikian, proses pembauran antar kelompok melalui interaksi sosial di lingkungan masyarakat berlangsung secara dinamis dan relatif harmonis. Dari sisi politik mereka mendukung sistem politik lewat berpartisipasi aktif dalam pemilihan legislatif di Kota Metro, tetapi kesadaran akan jumlah mereka masih belum bisa bersaing dalam perebutan kursi di parlemen. Kota Metro yang memiliki tingkat pluralisme etnis yang tinggi, dominasi kekuatan politik

masih berada di tangan masyarakat adat. Namun demikian, kehadiran kelompok pendatang dalam ranah politik menunjukkan adanya upaya aktif untuk bersaing secara sehat serta berkontribusi bersama masyarakat adat dalam memajukan Kota Metro di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan kajian dari Robert D. Putnam diatas yang melihat adanya korelasi antara budaya masyarakat dengan perilaku politiknya, maka Inilah yang menjadi concern dalam penelitian ini, fenomena golongan putih pada Pemilihan Wali Kota Denpasar Tahun 2020 menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif bagaimana budaya politik masyarakat kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena golongan putih. Guna mengkaji lebih dalam terkait faktor penyebab golput dan budaya politik masyarakat di Kota Denpasar, maka peneliti menggunakan teori perilaku politik (political behavior) dan budaya politik (politic culture).

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis merujuk pada pemilihan dan penentuan teori-teori yang digunakan sebagai dasar berpikir oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori-teori yang dianggap relevan untuk mendukung pembahasan terhadap isu yang diangkat. Teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Perilaku Politik (Political Behaviour)

Secara terminologis, Perilaku politik merujuk pada segala aktivitas yang melibatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah, baik dari arah masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya, yang berkaitan dengan proses perumusan, pelaksanaan, hingga penegakan keputusan-keputusan politik.

Pengertian ini sejalan dengan pandangan para ahli ilmu politik, salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Almond (1996:114) mengemukakan bahwa partisipasi atau perilaku politik tidak semata-mata berkaitan dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik. Menurutnya, perilaku politik justru berakar dari proses artikulasi kepentingan, yaitu saat individu mulai menunjukkan kemampuannya dalam memengaruhi dan mengelola sumber daya politik yang tersedia, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator politik. Oleh karena itu, perilaku politik menurut Gabriel Almond terbagi ke dalam tiga kategori, yakni artikulasi kepentingan, penyatuan kepentingan dan artikulasi kepentingan lanjutan.

Gaventa dan Valderma (2001:137) memaknai perilaku politik lebih sebagai kecenderungan atau orientasi untuk memengaruhi pemilihan wakil rakyat agar menempati posisi dalam lembaga-lembaga pemerintahan, dibandingkan dengan keterlibatan langsung dalam mekanisme pemerintahan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Anthony Downs (1980:9), yang menyebut bahwa perilaku politik merupakan sikap atau tindakan dari negara atau koalisi tertentu yang bertujuan untuk memengaruhi arah kebijakan melalui proses pemilihan anggota legislatif maupun kepala pemerintahan. Dengan demikian, pandangan Downs memiliki esensi yang sejalan dengan Gaventa dan Valderma, yaitu sama-sama menekankan bahwa perilaku politik lebih berfokus pada upaya memengaruhi representasi politik dalam lembaga formal ketimbang keterlibatan aktif dalam proses pemerintahan secara langsung.

Selain itu, Huntington dan Nelson (1994) dalam Hamid (2020:47) mengartikan perilaku politik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara

sebagai individu yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan politik tersebut dapat terjadi secara individu maupun kolektif, bersifat terorganisir atau spontan, berlangsung secara damai ataupun melalui kekerasan, serta bisa berada dalam ranah legal maupun ilegal, baik efektif maupun tidak. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa menurut Huntington dan Nelson, perilaku politik memiliki beberapa batasan penting. Pertama, perilaku politik mengacu pada aktivitas nyata, bukan sekadar sikap atau pandangan. Kedua, subjek dari partisipasi politik adalah individu sebagai warga negara biasa, bukan aktor profesional dalam bidang politik seperti pejabat atau anggota partai. Ketiga, bentuk aktivitas politik yang dimaksud adalah segala tindakan yang diarahkan untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan pemerintah, baik melalui cara sah maupun tidak sah, berhasil maupun tidak. Keempat, bentuk partisipasi politik bisa bersifat sukarela atas dasar kemauan sendiri, maupun terjadi karena adanya mobilisasi dari pihak lain.

Miriam Budiardjo (2002:367) memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perilaku politik, dengan melihatnya sebagai bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam dinamika kehidupan politik. Keterlibatan ini bisa tercermin dalam aktivitas seperti pemilihan pemimpin negara, serta dalam usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi arah kebijakan publik (public policy) yang dijalankan oleh pemerintah. Perilaku politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau

anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan lain sebagainya.

Perilaku politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal, bahkan bisa merupakan kombinasi keduanya. Ustman Abdul Mu'iz Ruslan (1954:101–102) menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, ajaran agama yang diyakini oleh individu memiliki peran dalam membentuk sikap politiknya. Kedua, jenis budaya politik yang dianut, yakni seperangkat nilai dan keyakinan terhadap aktivitas politik yang turut memengaruhi partisipasi. Ketiga, kondisi lingkungan politik, yaitu konteks sosial dan geografis tempat seseorang tinggal yang dapat membentuk tingkat kepedulian dan keterlibatan politik individu maupun kelompok.

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963:250) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi atau perilaku politik masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*). Faktor ini bahkan dianggap sebagai elemen kunci dalam mendorong berkembangnya perilaku politik warga negara. Pada dasarnya, *civic culture* mencerminkan sejauh mana nilai-nilai demokrasi tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat, yang menjadi indikator adanya warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara.

Selain berbagai pendapat sebelumnya, terdapat pula faktor eksternal seperti peran media massa yang kini turut memengaruhi kecenderungan politik individu. Arnold Steinberg (1981:65–66) menjelaskan bahwa media massa

memiliki dampak signifikan dalam membentuk perilaku politik seseorang. Menurutnya, akses yang luas terhadap berbagai jenis media, baik cetak maupun elektronik, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi serta wawasan politik secara lebih cepat dan meluas. Informasi ini kemudian berkontribusi pada meningkatnya kesadaran, kepedulian, dan respons terhadap isu-isu politik, yang pada akhirnya memengaruhi pembentukan sikap serta perilaku politik, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam hal partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pemilihan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, perilaku memilih dan perilaku tidak memilih.

1. *Voting Behavior*

Dalam kajian ilmu politik, perilaku individu saat memberikan suara dalam pemilu sering diidentifikasi melalui konsep perilaku memilih (*voting behavior*). Jack C. Plano (1985), sebagaimana dikutip oleh Sofiah (2003:18), menjelaskan bahwa *voting behavior* merupakan kajian yang berfokus pada pola atau kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan saat pemilihan umum berlangsung, termasuk alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan mereka dalam memilih calon atau partai tertentu. Sedangkan menurut Haryanto (2000) dalam Khasanah (2016:8) *Voting* adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.

Menurut Budiarmo (2001) dalam Khasanah (2016:8), *voting behavior* atau perilaku memilih diartikan sebagai bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses politik. Bentuk partisipasi ini dapat dilakukan melalui

berbagai cara, seperti memilih pemimpin negara serta memengaruhi arah kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas yang termasuk dalam perilaku politik ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri pertemuan politik, menjalin komunikasi atau melakukan lobbying dengan pejabat pemerintahan maupun anggota legislatif, bergabung dengan partai politik, atau turut serta dalam gerakan sosial yang menempuh aksi langsung (direct action), dan lain sebagainya.

Harold F. Gosnell (1934:287) menjelaskan bahwa aktivitas pemungutan suara merupakan suatu mekanisme di mana individu sebagai bagian dari suatu komunitas menyampaikan pendapatnya untuk turut menentukan kesepakatan bersama dalam pemilihan pejabat publik atau terhadap suatu keputusan yang diajukan. Dengan kata lain, konsep voting merujuk pada tindakan memberikan suara oleh seseorang sebagai bentuk keterlibatan dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok masyarakat.

Ada dua macam teori voting behaviour yang dapat dikelompokkan dalam dua mashab besar. Pertama, pendekatan voting dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan voting dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center (Gaffar, 1992:4-9). Selain dua mashab besar tersebut, adapula satu pendekatan yang biasa digunakan dalam menerangkan perilaku memilih adalah pendekatan pilihan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis, yang dikenal juga sebagai Mahzab Columbia, pertama kali dikembangkan oleh *Bureau of Applied Social Science* di Universitas Columbia. Pendekatan ini lahir dari studi terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1940. Para peneliti dalam kajian ini menemukan bahwa perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang bersifat struktural, seperti latar belakang status sosial ekonomi, agama, etnisitas, serta lokasi geografis tempat tinggal. Meski pendekatan ini memiliki kontribusi besar dalam memahami dinamika pilihan politik, secara metodologis pendekatan ini kerap dinilai sulit untuk diukur secara akurat, terutama dalam menetapkan indikator-indikator seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, dan kepercayaan agama.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis, yang juga dikenal sebagai Mahzab Michigan, dikembangkan oleh *Survey Research Center* dari Universitas Michigan. Pendekatan ini, menurut Dieter Roth, menempatkan individu sebagai fokus utama dalam memahami perilaku pemilih. Kelompok Michigan meyakini bahwa persepsi pribadi terhadap calon pemimpin serta isu-isu yang diangkat dalam pemilu memiliki pengaruh besar terhadap pilihan politik seseorang. Dalam pendekatan ini, sikap individu yang dianggap mencerminkan kepribadian dipandang sebagai faktor penting yang dapat membentuk perilaku politik. Pendekatan ini menyoroti tiga komponen psikologis utama

dalam menganalisis perilaku memilih, yaitu: keterikatan emosional dengan partai politik, pandangan terhadap isu-isu politik, dan persepsi terhadap calon pemimpin. Keputusan pemilih dalam memberikan suara dianggap sebagai hasil dari dorongan psikologis yang terbentuk melalui proses sosialisasi politik. Artinya, melalui proses individu mengenal sistem politik sejak dini, terbentuklah persepsi politik yang pada akhirnya memengaruhi pilihan dalam pemilu. Tujuan dari proses sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi politik pemilih.

c. Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Pendekatan ini diperkenalkan oleh Downs (1957) dalam Khasanah (2016:14), yang berpendapat bahwa pemilih bertindak berdasarkan pertimbangan rasional saat menentukan pilihan politiknya, tanpa terlalu dipengaruhi oleh latar belakang sosial atau lingkungan eksternal. Dalam perspektif *pilihan rasional (rational choice)*, pemilih akan terlebih dahulu menilai antara keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*) sebelum memutuskan untuk mendukung seorang kandidat. Penilaian ini biasanya berfokus pada sejauh mana program atau gagasan yang ditawarkan kandidat tersebut relevan dan menguntungkan bagi kepentingan pribadi pemilih.

Berbeda dengan pendekatan sosiologis dan psikologis yang cenderung melihat perilaku memilih sebagai sesuatu yang telah terbentuk jauh sebelum masa kampanye, pendekatan rasional menekankan bahwa keputusan memilih umumnya dibuat lebih mendekati waktu pemungutan suara, bahkan bisa saat berada di bilik suara. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku

memilih merupakan hasil dari evaluasi logis dan terkini terhadap pilihan yang tersedia.

2. *Non-voting Behavior*

Menurut pandangan Downs, Davis, Hinich, dan Ordeshook, perilaku tidak memilih (non-voting) dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu (golput) merupakan hasil dari pertimbangan rasional warga negara terhadap kualitas dan perbedaan antar kandidat. Downs dan Garvey menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama dibalik perilaku golput: pertama, sikap apatis yang muncul ketika pemilih merasa tidak ada perbedaan signifikan antara para calon; kedua, perasaan keterasingan (alienasi) ketika semua kandidat dianggap tidak layak untuk dipilih. Kekecewaan terhadap rekam jejak para calon juga dapat menjadi faktor yang memperkuat ketidaksukaan pemilih. Sejalan dengan itu, Dennis Chong mengemukakan bahwa keputusan individu dalam memilih, termasuk memilih untuk tidak memilih, dibentuk oleh sikap dan disposisi yang berkembang dari pengalaman sebelumnya, kondisi materiil yang dimiliki, serta dorongan atau insentif sosial yang diterima. Dengan kata lain, pilihan politik seseorang tidak lepas dari akumulasi persepsi yang terbentuk melalui konteks sosial dan historis yang mereka alami.

Dalam tulisannya yang berjudul *Tactical Voting and Tactical Non-Voting*, Stephen D. Fisher mengungkapkan bahwa baik faktor psikologis maupun sosiologis memiliki peran penting dalam memengaruhi hasil pemilu. Beberapa faktor yang dimaksud meliputi tingkat efektivitas politik (political efficacy), tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan para politisi, serta kesadaran akan

tanggung jawab sebagai warga negara. Individu yang memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap sistem politik cenderung merasa bahwa suara mereka tidak membawa dampak signifikan, dan siapa pun yang terpilih dalam pemilu tidak akan mengubah keadaan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa sistem pemerintahan tidak responsif, atau bahwa politisi yang berkuasa dianggap korup dan tidak mampu mewakili kepentingan rakyat secara nyata.

Asfar juga mengemukakan konsep serupa melalui istilah anomie, yang merujuk pada kondisi di mana individu merasa tidak berdaya atau kehilangan makna dalam berpartisipasi secara politik. Dalam pandangan ini, sebagian pemilih menganggap keterlibatan dalam aktivitas politik sebagai sesuatu yang tidak membawa hasil nyata, karena mereka merasa tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan atau keputusan politik. Bagi kelompok pemilih dengan pandangan seperti ini, menggunakan hak suara atau memilih untuk tidak ikut serta dianggap tidak memberikan perbedaan berarti, sebab keputusan-keputusan politik umumnya dipandang berada di luar jangkauan kendali masyarakat umum.

Ketidakminatan terhadap isu-isu politik dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologis yang dikemukakan oleh Milrath dan Goel mengenai sikap apatis. Mereka menyatakan bahwa tingkat kepentingan dan perhatian seseorang terhadap urusan publik memiliki kaitan erat dengan keputusan untuk menggunakan hak pilih. Individu yang memiliki minat tinggi terhadap politik dan secara aktif mengikuti informasi atau berita terkait isu-isu publik, cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya, mereka

yang kurang berminat terhadap dunia politik dan jarang menyimak perkembangan isu publik umumnya lebih berpotensi menjadi golongan tidak memilih (non-voter).

Konsep sikap apatis dalam teori perilaku tidak memilih juga dijelaskan oleh Jose Ramon Montero. Ia menyebut bahwa ketidakterlibatan dalam pemilu dapat disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap isu-isu politik atau karena rasa enggan untuk berpartisipasi. Bagi individu dengan pandangan seperti ini, siapa pun yang terpilih tidak akan membawa perubahan berarti bagi kehidupan mereka. Montero menekankan bahwa bentuk apatisisme ini bersifat sukarela, artinya muncul dari pilihan pribadi pemilih itu sendiri, bukan disebabkan oleh tekanan eksternal atau hambatan struktural yang berada di luar kendali mereka.

Jose Ramon Montero dalam artikelnya berjudul *Non-voting in Spain: Some Quantitative and Attitudinal Aspects* membedakan antara perilaku tidak memilih yang bersifat sukarela dan yang tidak sukarela. Ketidakikutsertaan yang dilakukan secara sukarela biasanya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bersifat aktif sebagai bentuk protes politik, dan bersifat pasif karena ketidakpedulian terhadap proses politik. Sementara itu, ketidakterlibatan yang tidak bersifat sukarela umumnya disebabkan oleh kendala administratif atau teknis, seperti kesulitan dalam proses pendaftaran pemilih, keterbatasan fisik akibat usia atau kondisi kesehatan, serta hambatan lain seperti sedang bepergian. Dalam konteks ini, non-voting yang tidak sukarela mencerminkan situasi di mana seseorang sebenarnya berniat untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun terhalang oleh faktor-faktor yang berada di luar kendalinya.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku tidak memilih di negara-negara Barat berasal dari teori yang dikembangkan oleh Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone. Mereka memandang bahwa faktor-faktor demografis seperti kondisi sosial, tingkat pendidikan, dan status ekonomi seseorang merupakan penentu utama dalam partisipasi politik. Individu dengan akses terbatas terhadap sumber daya tersebut misalnya, memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, penghasilan yang minim, atau tidak memiliki pekerjaan tetap cenderung lebih jarang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan mereka yang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang lebih mapan.

Merujuk pada uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa perilaku politik merupakan suatu pendekatan dalam ilmu politik yang digunakan untuk memahami bagaimana individu maupun kelompok berinteraksi dengan lembaga-lembaga politik dalam upaya menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka. Mengacu pada berbagai pandangan para ahli terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan beragam, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, antara lain:

Faktor sosial (keturunan, pendidikan dan pekerjaan); Faktor ekonomi (kesejahteraan masyarakat dan tingkat individu yang berkecukupan cenderung berpartisipasi aktif); Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah; Budaya masyarakat; Media massa.

1.6.2 Budaya Politik (*Political Culture*)

Sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam Riyanto (2006:3), budaya politik merupakan salah satu unsur penting dalam sistem politik karena merepresentasikan aspek subjektif yang ada dalam masyarakat. Budaya politik mencakup keseluruhan pandangan mengenai kehidupan politik, seperti norma-norma, orientasi-orientasi terhadap politik, serta pandangan umum terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, budaya politik lebih menitikberatkan pada dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol, dan harapan-harapan yang diyakini serta dijalankan oleh individu dalam masyarakat. Aktivitas politik seseorang tidak hanya digerakkan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ekspektasi politik serta persepsinya terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Rusadi Kantaprawira (1977:25) menekankan bahwa budaya politik lebih difokuskan pada pola perilaku politik individu serta orientasinya terhadap kehidupan politik secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa budaya politik merupakan bentuk dari pola tindakan politik dan sikap yang dijalani oleh anggota suatu sistem politik. Setiap Masyarakat baik yang berada dalam tatanan politik tradisional, transisional, maupun modern memiliki bentuk budaya politik yang khas dan melekat, karena budaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kolektif mereka.

Menurut Soetjipto Wirosardjono (1995:107), budaya politik merupakan bagian dari ekspresi kebudayaan nasional yang mencerminkan identitas suatu bangsa. Ia menekankan bahwa budaya politik mencakup unsur pendidikan

politik serta efektivitas dan efisiensi kerja lembaga-lembaga politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. Dengan kata lain, budaya politik dapat diartikan sebagai pola persebaran orientasi masyarakat terhadap objek-objek politik, atau bagaimana orientasi-orientasi tersebut terdistribusi secara khusus dalam mencapai tujuan politik suatu bangsa. Sementara itu, Rusadi Sumintapura (1988:23) mendefinisikan budaya politik sebagai bentuk perilaku dan orientasi individu terhadap dunia politik yang dijalani oleh anggota dari suatu sistem politik tertentu.

Menurut Almond dan Verba dalam Hamid (2020:118), budaya politik merujuk pada bentuk orientasi khas yang dimiliki warga negara terhadap sistem politik beserta unsur-unsurnya, termasuk sikap mereka terhadap peran sebagai warga dalam sistem tersebut. Sementara itu, Larry Diamond dalam Suryo (2015:33) menjelaskan bahwa budaya politik mencakup seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, pandangan, emosi, dan penilaian yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sistem politik di negaranya, serta persepsi individu mengenai peran yang seharusnya mereka jalankan dalam sistem tersebut. Adapun Samuel Beer berpendapat bahwa budaya politik mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap emosional yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan serta tugas-tugas apa saja yang perlu diemban oleh pemerintah.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan bentuk sikap dan perilaku politik yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan politik dalam suatu sistem tertentu. Lebih jauh, dapat dipahami bahwa

budaya politik dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis dalam struktur sosial yang telah mengakar sebelumnya, termasuk sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol, serta harapan yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Alfian (1986:244–245) berpendapat bahwa budaya politik mencerminkan refleksi langsung dari sistem sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pandangan lainnya, Alfian (1985:24) juga menegaskan bahwa lingkungan budaya memiliki peran penting dalam membentuk orientasi politik seseorang, di samping adanya faktor-faktor lain yang turut memengaruhi.

Menurut Almond dan Verba, dalam pembahasan mengenai sistem politik, terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan dan saling memperkuat, yakni unsur kognitif, afektif, dan evaluatif. Unsur kognitif mencakup pengetahuan serta keyakinan individu terhadap struktur dan mekanisme sistem politik, termasuk bagaimana sistem tersebut berfungsi. Sementara itu, unsur afektif merujuk pada dimensi emosional, yaitu sejauh mana individu memiliki keterikatan atau perasaan terhadap sistem politik. Adapun unsur evaluatif berkaitan dengan bagaimana seseorang memberikan penilaian moral terhadap sistem politik, termasuk sejauh mana individu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai politik serta bagaimana ia mengevaluasi kinerja sistem tersebut secara keseluruhan.

Almond dan Verba menjelaskan bahwa budaya politik dapat dipahami sebagai penyebaran pola-pola orientasi individu terhadap berbagai objek politik dalam suatu masyarakat atau bangsa. Berdasarkan pemahaman tersebut, keduanya mengelompokkan budaya politik ke dalam tiga jenis utama, yaitu: budaya politik

parokial, budaya politik subjek (kaula), dan budaya politik partisipan (Almond & Verba, 1990:20–22).

Pertama, tipe budaya politik parokial (*parochial political culture*) merujuk pada kondisi di mana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat minim, bahkan hampir tidak ada, yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan politik, seperti rendahnya tingkat pendidikan. Ciri lain dari budaya ini adalah tidak adanya ekspektasi terhadap perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Jenis budaya politik ini sering dijumpai dalam masyarakat dengan sistem politik tradisional atau yang masih sederhana. Dalam konteks ini, individu atau komunitas cenderung tidak menyadari keberadaan lembaga pemerintahan dan proses politik. Dalam masyarakat semacam ini, tokoh-tokoh seperti pemimpin adat, kepala suku, atau pemuka agama memiliki peran dominan, dan kehidupan politik bersifat statis, tanpa adanya perkembangan ide-ide baru, serta berjalan secara konvensional dan berulang (M. Mochtar & Andrews C. M., 2006:41).

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sejumlah karakteristik utama dari budaya politik parokial, di antaranya adalah: rendahnya atau bahkan tidak adanya perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek utama yang membentuk budaya politik; ketiadaan fungsi politik yang bersifat spesifik; dominasi peran para pemimpin komunitas dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan agama; serta ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap arahan pemimpin dalam hal partisipasi politik.

Selanjutnya, tipe kedua adalah budaya politik subjek atau kaula, di mana individu memiliki kesadaran yang cukup terhadap sistem politik secara

keseluruhan. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam proses masukan (input) dan peran aktif dalam keluaran (output) sistem politik masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, warga negara menyadari adanya otoritas pemerintahan dan memiliki keterikatan emosional terhadapnya, baik dalam bentuk kebanggaan maupun ketidaksenangan. Dengan kata lain, budaya politik subjek menggambarkan kondisi di mana masyarakat cenderung patuh terhadap keputusan politik dan kebijakan yang ditetapkan oleh elit penguasa, tanpa banyak berpartisipasi secara aktif dalam dinamika politik, termasuk dalam pemilu atau forum politik lainnya.

Beberapa ciri utama dari budaya politik kaula meliputi: tingginya frekuensi orientasi masyarakat terhadap pengetahuan umum mengenai sistem politik serta pemahaman terhadap hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, perhatian terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah cenderung rendah. Masyarakat dalam budaya ini sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik yang ada.

Ketiga, budaya politik partisipan merupakan jenis budaya politik di mana masyarakat secara aktif menunjukkan orientasi politik yang jelas terhadap keseluruhan sistem politik, termasuk struktur, proses politik, serta aspek administratif yang menyertainya. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik ini partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya.

Oleh karena itu, dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak sekadar menerima keputusan politik secara pasif. Mereka menyadari bahwa meskipun peran mereka dalam sistem politik mungkin kecil, kontribusi mereka tetap penting bagi kelangsungan dan fungsi sistem tersebut.

Beberapa ciri utama budaya politik partisipan meliputi: masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk budaya politik; mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem politik secara umum, khususnya peran pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, masyarakat aktif berperan serta dalam berbagai proses politik yang terjadi dan sudah terlibat secara langsung dalam sistem pemerintahan.

Pola budaya politik Indonesia yang dominan biasanya berasal dari kelompok etnis terbesar, yaitu etnis Jawa. Budaya ini sangat mempengaruhi sikap, perilaku, serta orientasi politik para elit politik di Indonesia secara umum. Menurut Affan Gaffar dalam teori politiknya, budaya politik masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yakni hierarki tegar, patronase (patron-klien), dan neo-patrimonialisme.

Hierarki tegar merujuk pada sikap di mana stratifikasi sosial memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan politik, sehingga pandangan penguasa terhadap rakyat sangat dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial. Dalam situasi ini, birokrat cenderung menunjukkan citra diri sebagai sosok yang penuh kemurahan hati dan pelindung rakyat. Sebagai konsekuensinya, masyarakat diharapkan untuk tunduk, patuh, dan setia kepada penguasa. Dalam budaya politik dengan pola hierarki tegar

ini, hubungan antara penguasa (Negara) dan rakyat yang dikuasai bersifat terpisah dan sangat jelas.

Menurut Gaffar, budaya politik patronase merupakan budaya yang paling dominan di Indonesia. Hubungan dalam budaya ini bersifat personal dan individual, seperti antara patron dan klien, majikan dan pekerja, atau atasan dan bawahan. Dalam situasi tertentu, pola ini juga terlihat pada hubungan antara guru dan murid. Interaksi antara kedua pihak bersifat timbal balik, di mana terjadi pertukaran kekuasaan, posisi, atau jabatan dengan tenaga, dukungan, sumber daya materi, serta loyalitas. Budaya politik seperti ini menjadi salah satu faktor yang memicu praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta ketidakadilan sosial di masyarakat.

Budaya politik neo-patrimonialistik menggambarkan keadaan di mana negara memiliki ciri-ciri modern dan rasional, seperti keberadaan birokrasi, namun sekaligus tetap mempertahankan unsur-unsur tradisional yang bersifat patrimonial. Hal ini berarti meskipun negara idealnya dijalankan secara birokratis dan rasional, dalam praktiknya pola lama yang mengedepankan hubungan patron-klien masih tetap berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada model ketiga ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) cenderung disamarkan melalui kebijakan dan aturan hukum, sehingga di permukaan masyarakat umum menganggap sistem politik berjalan dengan baik, padahal sebenarnya budaya politik yang dominan masih sangat dipengaruhi oleh pola patronase (Aos Kuswandi, 2010:47).

Mochtar Masoed dan Calin Mac Andrews (2006:42-43) mengemukakan tiga model budaya politik yang didasarkan pada proporsi ketiga tipe budaya politik yang diuraikan oleh Almond. Pertama adalah masyarakat demokratis industrial, di mana sekitar 40 hingga 60 persen dari penduduk dewasa merupakan partisipan aktif. Mereka terdiri dari aktivis politik dan individu yang secara kritis membahas isu-isu sosial dan pemerintahan. Kelompok ini juga berperan sebagai penekan yang mengajukan kebijakan baru demi melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, masyarakat dengan budaya politik subyek mencapai sekitar 3 persen dan budaya parokial sekitar 10 persen. Model ini biasanya ditemukan pada sistem sosial-politik yang sudah cukup maju, dengan masyarakat yang cenderung kritis dan rasional, biasanya tinggal di daerah perkotaan atau kawasan industri.

Kedua adalah masyarakat yang hidup dalam sistem politik otoriter. Pada sistem ini, mayoritas warga hanya berperan sebagai subjek pasif yang mengakui keberadaan pemerintah dan tunduk pada aturan yang berlaku, namun tidak aktif terlibat dalam urusan pemerintahan. Sebagian kecil masyarakat termasuk dalam budaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan biasanya terdiri dari mahasiswa, intelektual, pengusaha, dan pemilik tanah yang kerap menentang bahkan melakukan protes terhadap sistem politik yang berjalan. Sementara itu, kelompok parokial, yang cenderung minim interaksi dengan sistem politik, biasanya adalah para petani dan buruh tani yang tinggal serta bekerja di daerah perkebunan. Model masyarakat ini umumnya dikategorikan dalam fase menengah

dengan sistem sosial-politik yang masih sederhana namun relatif terbuka, dan secara geografis mereka umumnya tinggal di pinggiran kota atau daerah pedesaan.

Ketiga adalah sistem demokrasi pra-industri. Dalam sistem ini, mayoritas penduduknya menganut budaya politik parokial. Mereka biasanya tinggal di daerah pedesaan dan memiliki tingkat melek huruf yang rendah. Pengetahuan serta keterlibatan mereka dalam aktivitas politik sangat terbatas. Sedangkan kelompok dengan budaya politik partisipan jumlahnya sangat sedikit, umumnya berasal dari kalangan profesional terpelajar, pengusaha, dan pemilik tanah. Proporsi individu yang mengikuti budaya politik subyek juga relatif kecil. Kelompok masyarakat ini biasanya masih termasuk dalam tahap sistem sosial yang sangat sederhana dan kebanyakan tinggal di wilayah pedalaman atau pedesaan yang aksesnya sulit dijangkau oleh fasilitas publik.

Pendapat-pendapat yang mengklasifikasikan model budaya politik di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang cukup beragam. Hal ini tetap relevan mengingat keberagaman budaya dan suku yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, secara konseptual, budaya politik nasional dapat dipahami sebagai gabungan dari berbagai sub-budaya politik yang ada. Baik pengelompokan berdasarkan aspek sosio-kultural seperti yang dikemukakan oleh Feith dan Geertz, maupun budaya politik daerah yang diadaptasi ke tingkat nasional oleh para aktor politik, semuanya menciptakan interaksi antar sub-budaya politik yang bisa berbentuk kerja sama, persaingan, atau bahkan konflik politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Saleh dan Munif (2015:313) mengelompokkan variasi budaya politik yang muncul dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat yang dianggap sebagai faktor utama dalam perkembangan budaya politik.
- b. Kondisi ekonomi masyarakat; semakin tinggi taraf ekonomi atau kesejahteraan, semakin besar pula partisipasi politik yang dilakukan masyarakat.
- c. Semangat reformasi politik atau political will, yaitu dorongan untuk memperbaiki dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik.
- d. Penegakan supremasi hukum yang adil, mandiri, dan bebas dari campur tangan.
- e. Media komunikasi yang bersifat independen, berfungsi sebagai pengawas sosial, serta bebas dan mandiri dalam menjalankan perannya.

Kota Denpasar dalam studi ini digambarkan sebagai kota yang multikultural dengan keberadaan berbagai kelompok sosial yang beragam. Menurut Max Weber, dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok sosial memiliki perbedaan satu sama lain meskipun mereka hidup dalam satu masyarakat yang sama. Weber menyatakan bahwa keberagaman kelompok dalam masyarakat terkait erat dengan struktur yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya. Indonesia sendiri merupakan contoh masyarakat multikultural, terdiri dari beragam etnis atau suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, profesi, hingga golongan politik. Istilah multikulturalisme merujuk pada sikap menerima kelompok

lain secara setara sebagai bagian dari keseluruhan, tanpa memandang perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama.

Secara umum, kelompok masyarakat di perkotaan cenderung berpindah secara kolektif ke daerah lain atau kota-kota besar. Menurut Suparlan (1985), setiap kelompok etnis biasanya menetap di wilayah yang secara turun-temurun dianggap sebagai tempat sumber penghidupan mereka dan diakui pula oleh kelompok suku bangsa lain sebagai hak mereka. Setiap suku mengembangkan kebudayaannya berdasarkan karakteristik serta potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya, sekaligus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, pandangan hidup, dan etos yang dimiliki. Karena itulah, tiap kelompok masyarakat memiliki corak budaya yang unik dan berbeda satu sama lain.

1.6.3 Politik Masyarakat Perkotaan (*Urban Society Politics*)

Masyarakat perkotaan sering kali dikaitkan dengan masyarakat modern dan kerap dipandang berlawanan dengan masyarakat pedesaan yang lebih dikenal sebagai masyarakat tradisional, terutama jika dilihat dari segi budaya. Masyarakat modern adalah kelompok yang mayoritas anggotanya memiliki orientasi nilai budaya yang lebih mengarah pada kehidupan di era peradaban sekarang. Biasanya, masyarakat modern ini tinggal di wilayah perkotaan, sehingga sering disebut sebagai masyarakat kota. Sebenarnya, perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan bersifat bertahap dan tidak jelas batasnya, karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan fenomena sosial yang dikenal dengan istilah urbanisme.

Pengertian masyarakat kota lebih menitikberatkan pada karakteristik kehidupan serta ciri-ciri yang membedakannya dari masyarakat pedesaan. Fokus perhatian masyarakat kota tidak hanya terbatas pada hal-hal seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, melainkan juga meluas ke berbagai aspek lainnya. Umumnya, masyarakat perkotaan mampu mengatur kehidupan mereka secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Pola pikir rasional yang dianut masyarakat kota membuat interaksi sosial lebih didasarkan pada kepentingan bersama dibandingkan hubungan personal. Perubahan sosial terjadi secara nyata karena kota cenderung terbuka menerima pengaruh dari luar. Hal ini kadang menimbulkan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Lerner (1958:25) dalam teori modernisasinya yang dikutip oleh Cahyono, urbanisasi menimbulkan struktur komunikasi yang dalam ranah psikologis individu disebut sebagai “empati,” yakni kemampuan seseorang untuk membayangkan dirinya berada dalam posisi sosial yang berbeda pada saat tertentu.

Menurut Daldjoeni (1997:51-57), kehidupan masyarakat perkotaan dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek mental. Pada aspek fisik, struktur sosial kota dapat dijelaskan melalui beberapa fenomena sebagai berikut:

- a. Heterogenitas sosial: Keberagaman penduduk memunculkan persaingan dalam pemanfaatan ruang. Setiap individu cenderung memilih lokasi atau posisi yang paling menguntungkan baginya sehingga terjadi spesialisasi dalam masyarakat;

- b. Hubungan sekunder: Jika interaksi antarwarga desa bersifat primer (dekat dan personal), maka hubungan antar warga kota bersifat sekunder, yakni lebih terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Karena tempat tinggal yang tersebar, pengenalan antar individu juga hanya sebatas perhatian tertentu saja;
- c. Toleransi sosial: Meskipun secara fisik orang-orang tinggal berdekatan di kota, secara sosial mereka cenderung berjauhan atau tidak begitu dekat satu sama lain;
- d. Mobilitas sosial: Mengacu pada perubahan status sosial seseorang, individu berusaha untuk naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Dalam kehidupan kota, profesionalisme menjadi kunci, sehingga melalui pekerjaan atau profesi seseorang dapat mencapai peningkatan status. Selain usaha individu, solidaritas antar kelompok profesi juga terbentuk. Persaingan dalam ruang menyebabkan terbentuknya pola sosial yang mencerminkan penyebaran tempat tinggal sekaligus aktivitas sosial-ekonomi, sehingga terjadi pemisahan berbasis ras, misalnya wilayah yang didominasi oleh etnis Cina, Arab, atau komunitas keagamaan tertentu (kauman).

Kedua, aspek mental lebih melihat pada aspek kejiwaan masyarakat kota. Adapun kejiwaan masyarakat kota dapat diperinci atas beberapa gejala. Atomisasi dan pembentukan massa, kepekaan terhadap rangsangan dan sikap masabodo, egalisasi dan sensasi, industri kesenangan dan pengisian waktu luang.

Derya Oktay (2002:261) mengemukakan bahwa kota adalah ruang domisili sekaligus arena sosialisasi dan praktik budaya para pemukimnya. Ekspresi

kultural itu dapat diakomodasi secara selayaknya. Dinamika kehidupan masyarakat urban dalam mencari sebuah identitas baru sebagai eksistensi dalam sebuah kelompok atau komunitasnya tak lepas dari konstruksi lingkungan sosial, budaya dan tradisi. Lingkungan, bagi masyarakat urban mendorong untuk mengekspresikan diri dan terlibat dalam komunitas atau pengorganisasian sebuah pemukiman. Pada situasi inilah masyarakat urban akan menentukan identitasnya yang baru.

Dalam mengaitkan antara konsep politik dengan masyarakat urban, maka politik di kawasan perkotaan dapat dipahami sebagai ruang praktik kekuasaan, kewenangan, keterlibatan dalam ruang publik, sistem pemerintahan, negara, kebijakan, hingga pada proses alokasi sumber daya. Kajian tentang teori-teori perkotaan terus mengalami dinamika, seiring dengan perbedaan asumsi dasar yang diajukan, khususnya terhadap pertanyaan mendasar seperti "apa itu kekuasaan (power)" dan bagaimana kekuasaan tersebut dapat dijelaskan dalam konteks kota.

Salah satu pendekatan yang cukup relevan untuk memahami politik kota adalah teori elit. Teori ini meyakini bahwa keputusan-keputusan penting dalam sistem politik kota ditentukan oleh segelintir kalangan elit. Dalam strukturnya, masyarakat terdiri atas dua kelompok besar: kelompok kecil yang disebut elit—yakni mereka yang menguasai berbagai sumber daya—dan kelompok mayoritas yang cenderung tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. Kelompok elit menempati posisi sosial yang lebih tinggi dan karena itu memiliki peluang lebih besar dalam mempengaruhi arah kekuasaan dan kebijakan di lingkungan perkotaan.

Secara empiris, kenyataan ini dapat diamati dalam struktur kekuasaan lokal di berbagai kota.

Terkait dengan itu, konsep *growth machine* atau mesin pertumbuhan menyoroti bahwa perkembangan kota lebih digerakkan oleh pertimbangan ekonomi. Dalam pandangan ini, kelompok elit ekonomi memainkan peran utama dalam menentukan arah pembangunan kota, berbeda dengan teori elit yang lebih menekankan dominasi kekuasaan politik. Fokus utama teori *growth machine* adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, kota diposisikan sebagai arena persaingan antar kepentingan ekonomi, yang seringkali tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh masyarakat secara luas. Studi ini menitikberatkan pada dinamika pertumbuhan kota dan siapa yang paling diuntungkan darinya.

Selain itu, keragaman masyarakat di kawasan urban juga melahirkan konsep etnisitas perkotaan (*urban ethnicity*). Cohen dan Jacobson menyebut bahwa etnisitas urban merujuk pada kelompok etnis yang masih memiliki keterikatan emosional maupun sosial dengan kampung halamannya. Oleh karena itu, perilaku politik dan sosial kelompok ini tidak bisa hanya dipahami berdasarkan lingkungan tempat tinggal mereka di kota, melainkan juga melalui keterhubungan dengan konteks yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional, yang turut membentuk pola tindakan mereka (Jacobson, 2009:438).

Menurut Bates, dalam konteks masyarakat yang memiliki keragaman etnis yang tinggi, sangat disarankan untuk tidak menerapkan sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip “pemenang mengambil semua”. Sistem seperti ini cenderung mengabaikan kelompok minoritas dan dapat memicu eksklusi politik

(Bates, 1999:33). Sebagai gantinya, sistem representasi yang lebih inklusif dan proporsional perlu diterapkan, agar kelompok minoritas juga dapat terlibat dalam proses pembentukan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi kekhawatiran akan marginalisasi politik dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

Bila dikaitkan dengan budaya politik di Kota Denpasar sebuah wilayah dengan karakteristik multikultural yang kuat pembahasan ini mencakup keragaman segmen masyarakat kota yang berlatar belakang berbeda, baik dari aspek etnis, agama, budaya, maupun elemen sosial lainnya. Budaya dalam konteks ini tidak lagi bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur kebudayaan yang membentuk masyarakat hibrid. Dalam masyarakat seperti ini, keragaman budaya justru memberikan ruang yang dinamis bagi pembentukan identitas baru yang terus mengalami konstruksi dan perubahan makna seiring waktu.

1.6.4 Perubahan Sosial Membentuk Perilaku Politik *Non-voting* Masyarakat Kota

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan dapat terjadi di semua jenis lingkungan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya proses interaksi yang terus berlangsung dengan komunitas luar, serta pengaruh modernisasi yang masuk melalui berbagai saluran. Tidak ada masyarakat yang benar-benar stagnan, sebab pada dasarnya setiap komunitas akan mengalami perubahan, baik secara bertahap maupun cepat, tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang

mempengaruhinya. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat desa yang sering kali dianggap sebagai komunitas paling tradisional sekalipun.

Sebaliknya, masyarakat perkotaan dikenal sebagai kelompok sosial yang cenderung lebih dinamis. Tingkat perubahan di kota jauh lebih cepat karena ditunjang oleh beragam fasilitas dan akses terhadap informasi serta teknologi. Selain itu, keterbukaan terhadap ide-ide baru dari luar juga menjadi faktor utama yang membuat masyarakat kota lebih cepat dalam merespons dan beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Masyarakat perkotaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat desa. Ciri ini terbentuk karena struktur sosial kota yang memang berbeda dengan masyarakat desa sehingga membentuk kejiwaan masyarakat kota. Masyarakat kota yang cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan impersonal, dalam berinteraksi akan mengedepankan rasio dan lebih pada manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut. Struktur sosial kota merupakan aturan yang berlaku dalam pola kehidupan dalam masyarakat kota. Struktur yang ada dalam masyarakat berawal dari kebiasaan, budaya yang kemudian dapat menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Diseminasi ataupun penyebaran informasi (information sharing) merupakan bagian dari interaksi sosial. Dalam studi manajemen Human Information Interaction (HII), information sharing menjadi fokus dalam mempelajari alur informasi baik antar manusia, maupun manusia dengan mesin (komputer). Penyebaran informasi dan akses informasi di desa dan kota terjadi perbedaan. Di desa dapat digambarkan pengetahuan tentang teknologi informasi

masih sangat minim dan rendah serta akses yang kurang menunjang, seperti dari segi tempat yang masih cenderung terletak di pelosok, peralatan, dan jaringan internet yang kurang memadai.

Selain hal itu, masyarakat pedesaan yang dikenal dengan masyarakat tradisional cenderung lambat dalam menerima modernisasi atau perubahan-perubahan baru dan mereka lebih memegang adat istiadat yang ada di desa sehingga masih banyak yang belum mengetahui perkembangan teknologi informasi yang sedang terjadi saat ini. Sementara di kota, perkembangan teknologi sangat pesat dan akses informasi yang mudah dijangkau oleh semua orang. Masyarakat kota sering diasumsikan sebagai masyarakat yang pintar, tidak mudah tertipu, cekatan dalam berpikir, dan bertindak, dan mudah menerima perubahan, maka dari itu masyarakat kota disebut sebagai masyarakat modern.

Dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pemilu atau pemilihan umum, Weimer sebagaimana dikutip oleh Mohtar dan Andrews (2011:56–57) menyatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik. Salah satu faktor tersebut adalah proses modernisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, yang mendorong meningkatnya aspirasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan itu, masyarakat perkotaan yang hidup dalam lingkungan modern umumnya menunjukkan keterlibatan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang relatif lebih tradisional.

Senada seperti yang diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat kecenderungan perbedaan antara pemilih di wilayah perkotaan

dengan pemilih di wilayah pedesaan. Bukan tanpa sebab adanya perbedaan tingkat kecenderungan pemilih ini, misalnya seperti di wilayah perkotaan tim sukses kampanye pasangan lebih mudah menjangkau pemilih. Selain itu, media juga dengan mudah secara langsung sampai pada masyarakat perkotaan. Sedangkan jangkauan timses dan media untuk bisa menggerakkan masyarakat di pedesaan relatif terbatas (merdeka.com, 2014).

Wilayah perkotaan, masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi serta pendapatan yang memadai justru cenderung enggan menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana pendidikan yang lebih tinggi membuka akses individu terhadap berbagai sumber informasi mengenai dinamika sosial dan politik di lingkungannya. Melalui berbagai saluran seperti media cetak, elektronik, dan platform daring, mereka mampu memahami secara kritis kinerja pemerintah, baik keberhasilan maupun kekurangannya. Informasi yang diperoleh inilah yang kemudian dapat memengaruhi keputusan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah biasanya tetap menggunakan hak pilihnya, kemungkinan besar karena mereka memandang pemilu sebagai rutinitas yang harus diikuti dan masih terikat kuat pada arahan tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin lokal (Asfar, 2004:128).

1.7. Kerangka Pemikiran

Salah satu indikator utama dari terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya terhadap calon pemimpin yang akan

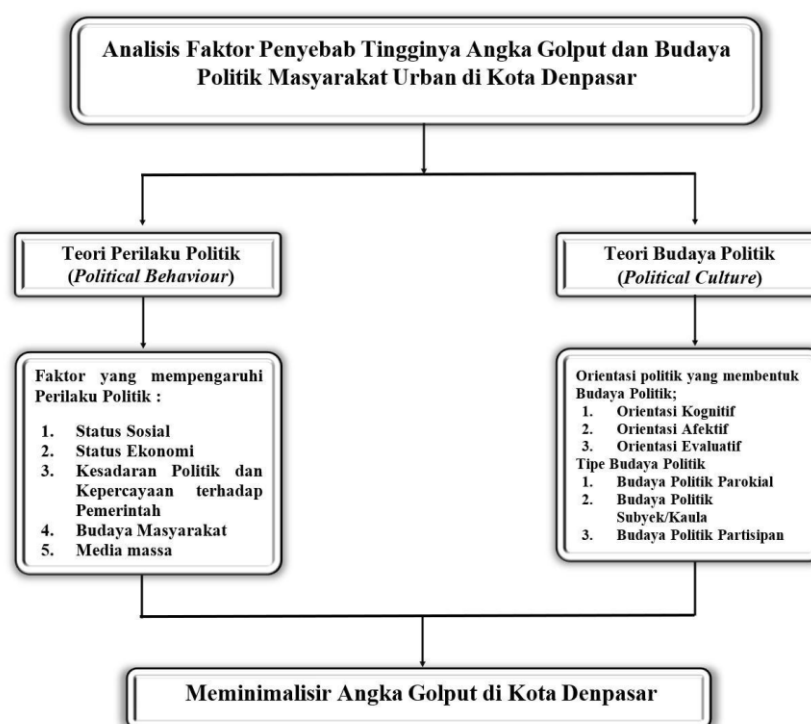
memegang amanah selama periode lima tahun ke depan. Dalam konteks demokrasi, hak memilih juga merepresentasikan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan. Pemimpin yang berhasil terpilih melalui mekanisme pemilu memikul mandat langsung dari rakyat, yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan publik.

Mayoritas penduduk Kota Denpasar merupakan pendatang, baik yang berasal dari luar Pulau Bali maupun dari kabupaten-kabupaten lain di dalam Bali sendiri. Diperkirakan sekitar 75 persen populasi Denpasar adalah kaum urban. Menurut Robert D. Putnam (1993), terdapat hubungan erat antara karakter budaya suatu masyarakat dengan pola perilaku politik yang mereka tampilkan. Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan teori perilaku politik (*political behaviour*) serta teori budaya politik (*political culture*).

Hamid (2020:36) menyatakan bahwa perilaku politik merujuk pada segala bentuk aktivitas warga negara, baik secara individu maupun kolektif, yang ditujukan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perkembangannya, konsep perilaku politik sangat erat kaitannya dengan budaya politik. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan substansial ketika dianalisis secara lebih mendalam. Perilaku politik lebih menekankan pada respons individu terhadap sistem politik yang terejawantahkan dalam tindakan nyata, sedangkan budaya politik merefleksikan internalisasi perilaku politik yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai dan praktik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dua teori yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan pemilu maupun pemilihan kedepan dengan meminimalisir golput dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Denpasar dan KPU Kota Denpasar sehingga dapat menyusun strategi sosialisasi berdasarkan budaya politik masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun kerangka pemikiran yang dibuat peneliti dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



Penelitian ini didasarkan pada dua pendekatan teoritis, yaitu teori perilaku politik dan teori budaya politik. Teori perilaku politik menyoroti faktor-faktor seperti status sosial, status ekonomi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, budaya masyarakat, dan pengaruh media massa yang memengaruhi

perilaku memilih. Sementara itu, teori budaya politik mencakup orientasi politik kognitif, afektif, dan evaluatif, serta tipe budaya politik parokial, subyek/kaula, dan partisipan. Keduanya menjadi dasar dalam upaya meminimalisir angka golput di Kota Denpasar.

1.8. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merujuk pada penjabaran ide secara umum yang bertujuan untuk membedakan satu konsep dengan konsep lainnya secara jelas. Adanya definisi ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam pemahaman suatu konsep. Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah variabel yang menjadi objek pengukuran atau pengamatan. Oleh karena itu, setiap variabel tersebut perlu dijelaskan batasan konsepnya secara konseptual agar dapat dipahami secara tepat dalam konteks penelitian ini.

1.8.1. Golongan Putih (Golput)

Menurut Priyatmoko, dkk (Lembaga Penelitian Unair, 1992 dalam Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya) mengartikan golongan putih (Golput) sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada event pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat. Lain kata, masyarakat dalam taraf ini telah berada dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.

1.8.2. Masyarakat Urban (*Urban Community*)

Masyarakat urban atau masyarakat perkotaan (*urban community*) adalah sekumpulan masyarakat yang anggotanya relatif besar yang dapat berasal dari penduduk yang berpindah dari desa ke kota dengan bermata pencaharian utamanya berdagang dan industri. Masyarakat urban menempati wilayah atau daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern yang menyerupai ciri-ciri kota atau menuju ke arah kota.

1.8.3. Perilaku Politik (*Political Behaviour*)

Perilaku politik dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok dalam rangka memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti menggunakan hak suara dalam pemilu, menghadiri kegiatan politik seperti rapat umum, menjalin komunikasi atau melakukan lobi terhadap pejabat publik, serta keterlibatan dalam partai politik maupun gerakan sosial tertentu.

Beberapa unsur yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku politik antara lain aspek sosial meliputi latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan; aspek ekonomi, di mana kesejahteraan individu menjadi salah satu pemicu partisipasi aktif; tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan; nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat; serta peran media massa sebagai saluran informasi dan pembentuk opini.

1.8.4. Perilaku Memilih (*Voting Behaviour*)

Perilaku memilih dapat dipahami sebagai bagian dari perilaku politik yang bersifat terbuka dan nyata, sebagaimana diuraikan oleh Jack Plano

(1985:161). Sementara itu, menurut Haryanto dalam Khasanah (2016:8), aktivitas memberikan suara dalam pemilu dilakukan oleh warga negara yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih sah, sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan wakil atau pemimpin yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan memilih ini mencerminkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat atau partai politik tertentu yang dianggap mampu mewakili aspirasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pilihan tersebut biasanya didasari oleh kesesuaian nilai antara pemilih dan yang dipilih, di mana nilai dimaknai sebagai preferensi terhadap tujuan maupun cara pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan respons yang bersifat psikologis dan emosional, yang diekspresikan melalui tindakan politik berupa dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu dengan cara menggunakan hak suara.

1.8.5. Budaya Politik (*Political Culture*)

Budaya politik dapat dimaknai sebagai bentuk sikap dan perilaku politik yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok dalam dinamika kehidupan bernegara, khususnya dalam sistem politik yang berlaku. Ekspresi dari budaya politik warga negara dapat terlihat dalam berbagai proses politik, seperti saat pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan publik, mekanisme rekrutmen dalam partai politik, kegiatan kampanye, hingga keterlibatan aktif dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai wujud partisipasi politik mereka.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Ruang lingkup mencakup perilaku golput pada Pilwali Kota Denpasar. Informan dipilih secara purposif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif. Instrumen utama adalah peneliti dengan panduan wawancara.

1.9.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan **kualitatif** karena dianggap paling tepat untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena yang tidak dapat direpresentasikan secara optimal melalui angka atau data statistik seperti pada pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang relevan guna menganalisis isu yang diangkat, serta untuk merumuskan teori atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang solusi atas permasalahan yang diteliti.

Lebih lanjut Wahyuni (2012:12) menyatakan bahwa “*Qualitative research is descriptive*” (penelitian kualitatif adalah deskriptif). Selanjutnya Creswell (2013:145) juga berpendapat bahwa “*Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through words or pictures*”. Dari penjelasan Creswell dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang berperan sebagai pendekatan untuk prosedur menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-

kata yang bersifat non angka yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti mengambil deskriptif dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli tersebut bahwa penelitian kualitatif cenderung dilakukan dengan metode deskriptif. Dengan metode ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci fenomena golongan putih (golput) yang terjadi di Kota Denpasar, kemudian mencari faktor penyebab tingginya angka golput serta bagaimana budaya politik masyarakat Kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena golongan putih (Golput) di Kota Denpasar.

1.9.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merujuk pada batasan kajian yang menggambarkan secara rinci fokus utama penelitian. Hal ini mencakup aspek-aspek penting yang menjadi objek kajian peneliti dalam upaya menjawab berbagai rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam. Lingkup penelitian memiliki tujuan untuk membatasi peneliti dengan pengumpulan data yang relevan dengan masalah dari tujuan penelitian, dengan demikian penelitian dapat memfokuskan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Adapun aspek yang diteliti adalah mengenai faktor penyebab tingginya angka Golongan Putih (Golput) dan bagaimana budaya politik masyarakat Kota Denpasar dalam menjelaskan fenomena golongan putih (Golput) di Kota Denpasar berdasarkan teori perilaku politik dan budaya politik.

1.9.3. Informan Penelitian

Seorang informan dalam penelitian lapangan adalah seseorang dalam peranan resmi atau tidak resmi yang menceritakan dan menginformasikan tentang kondisi lapangan. Informan juga merupakan pihak yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti harus mencari dan memilih informan yang berkompetensi dengan permasalahan penelitian.

Menurut Neuman (2006:411), informan penelitian lapangan yang ideal memiliki empat karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang informan yang dianggap baik adalah individu yang benar-benar memahami dan menyatu dengan budaya setempat serta berada pada posisi strategis untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa penting. Ia menjalani keseharian yang sarat dengan nilai budaya tanpa harus secara sadar memikirkannya. Pengalaman mendalam yang telah dibangun selama bertahun-tahun membuatnya bukan lagi orang baru dalam budaya tersebut, melainkan bagian dari kehidupan budaya itu sendiri.
- b. Seseorang yang saat ini terlibat di lapangan. Mantan anggota yang tercermin di lapangan dapat memberikan wawasan yang berguna, tetapi semakin lama mereka telah pergi dari keterlibatan langsung, makin besar kemungkinan mereka merekonstruksi apa yang pernah mereka dapatkan.
- c. Seseorang yang dapat menghabiskan waktu bersama peneliti. Mewawancarai dapat mengambil banyak waktu, dan beberapa anggota memang tidak bersedia untuk diwawancarai secara mendalam).

- d. Seseorang yang non analitik membuat informasi menjadi lebih baik. Seorang informan non analitik mengenal teori terkait keadaan rakyat asli atau kebijakan pragmatis umum. Hal ini kontras dengan anggota yang menganalisis terlebih dahulu sebelum menetapkan, sesuatu jawaban menggunakan media atau pendidikan. Meskipun anggota terdidik pada ilmu pengetahuan sosial dapat belajar untuk merespon cara non analitik, tetapi hanya jika mereka mengesampingkan pendidikan mereka dan menggunakan sisi perspektif mereka).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, informasi yang menjawab permasalahan penelitian akan diperoleh dari informan yang mengetahui tentang permasalahan penelitian. Oleh karena itu, informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Denpasar.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Jika kamu ingin dilanjutkan dengan penjabaran masing-masing (primer dan sekunder), silakan beri tahu saya bisa bantu susun format lengkapnya.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013:308), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian ini, informasi primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan individu yang telah ditentukan sebagai informan, serta melalui kegiatan observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Dalam pandangan Sugiyono (2013:308), data sekunder adalah jenis data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Data ini berasal dari pihak lain dan umumnya berbentuk dokumen tertulis, bukan hasil wawancara atau pengamatan langsung. Meskipun bukan sumber utama, data ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung proses pengumpulan informasi dalam penelitian. Dalam studi ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar serta berbagai artikel yang dipublikasikan melalui media daring.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data memegang peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam melakukan analisis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sangat menentukan sejauh mana kualitas data tersebut dapat diandalkan. Sejalan dengan hal ini, Kumar (2005:119) menyatakan bahwa pemilihan metode yang paling sesuai harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, serta keterampilan peneliti dalam menerapkannya.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara. Menurut Kumar (2005:123), wawancara dapat diartikan sebagai bentuk interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Tujuan dari teknik ini adalah menggali permasalahan secara lebih

mendalam dan terbuka, di mana informan diminta untuk menyampaikan pandangan serta gagasan mereka. Proses wawancara dilakukan guna memperoleh data, informasi, serta bukti-bukti yang akurat dan relevan sebagai dasar penguatan dalam penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Mengacu pada pendapat Wahyuni (2012:53), wawancara semi-terstruktur memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan pewawancara mengajukan pertanyaan baru yang relevan berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan. Pendekatan ini memberi keuntungan karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam melalui proses komunikasi yang interaktif dan terbuka, sehingga jawaban yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam

Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pendekatan yang merujuk pada konsep yang dijelaskan oleh Creswell dalam buku *Metodologi Penelitian Administrasi* karya Hamdi dan rekan (2014, Bab 7:21). Adapun bentuk wawancara yang digunakan antara lain meliputi: wawancara tatap muka secara individual, wawancara melalui sambungan telepon, wawancara kelompok (*focus group discussion*), serta wawancara daring menggunakan surat elektronik atau platform digital lainnya. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan konteks serta kondisi partisipan.

Berdasarkan keempat cara wawancara yang dikemukakan Creswell tersebut, peneliti akan menyesuaikan dengan situasi dan keadaan lapangan saat

peneliti turun kelapangan untuk melakukan wawancara, kemudian memilih cara yang tepat dalam melakukan wawancara bersama dengan informan yang telah dipilih dengan memperhatikan etika dan estetika wawancara.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk mengolah data sehingga dapat ditafsirkan dan dimaknai secara ilmiah guna menemukan solusi terhadap persoalan yang diteliti. Menurut Berg (2001:35), proses analisis data dapat dijelaskan sebagai rangkaian dari tiga aktivitas utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga elemen ini menjadi inti dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan secara sistematis.

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, proses reduksi data tidak bertujuan untuk mengukur data secara kuantitatif atau nominal. Sebaliknya, reduksi dilakukan sebagai upaya menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif agar lebih mudah diakses dan dipahami. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serta menyoroti tema-tema dan pola-pola penting dalam data. Proses ini juga mencakup penentuan fokus analisis, pemilihan data yang relevan (sampling), serta penyusunan ulang data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan dapat dikelola secara efisien.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan melalui pengorganisasian data ke dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, ringkasan numerik, pernyataan penting, serta pengelompokan ulang data yang relevan sesuai kebutuhan analisis.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan serangkaian pertimbangan dan penilaian berdasarkan data yang diperoleh serta merujuk pada literatur yang relevan. Keputusan-keputusan tersebut sebagian besar terbentuk dari hasil pengumpulan data, seperti melalui pengamatan langsung di lapangan, pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara, serta telaah terhadap berbagai dokumen pendukung.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengolah dan menganalisis data hasil penelitian menggunakan langkah-langkah sistematis yaitu mengelompokkan data yang telah dikumpulkan (*data reduction*), kemudian data yang telah dipilih,, disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau tabel agar mudah dipahami (*data display*), dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan (*conclusions drawing*). Apabila penyajian data yang dilakukan belum mencukupi untuk merumuskan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya, maka peneliti akan melengkapi data tambahan yang diperlukan. Setelah itu, proses reduksi data akan dilakukan kembali guna memastikan validitas data, hingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.9.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alamiah yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia itu sendiri, yaitu peneliti sebagai pelaku utama, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu proses penelitian. Oleh sebab itu, dalam studi ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Peneliti juga dibantu oleh sejumlah perangkat pendukung seperti buku referensi, alat dokumentasi berupa perekam suara dan gambar, serta panduan wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sesuai dengan isu yang diteliti.